



ISBN 978-602-7981-38-6

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI

“Peluang dan Tantangan Menuju
Masyarakat Ekonomi ASEAN
(ASEAN Economic Community) 2015”



Yogyakarta, 5 Februari 2015

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

5 Februari 2015

**PENDIDIKAN VOKASI : PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)
2015**

ISBN : 978-602-7981-38-6

I. Artikel II. Judul III. Muhammad Izzuddin Mahali, M.Cs., dkk.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Judul Buku:

**PENDIDIKAN VOKASI : PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015**

Penyunting:

Muhammad Izzuddin Mahali, M.Cs.

Muslikhin, M.Pd.

Nur Hasanah, M.Cs.

Tata Letak / Cover :

Athika Dwi Wiji Utami, M.Pd.

Penerbit:

UNY Press

Kompleks Fak.Teknik UNY, Kampus Karangmalang

Yogyakarta 55281 Phone: (0274) 589346

E-mail: unypress.yogyakarta@gmail.com



Kata Pengantar

Pendidikan vokasi saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan kualitas telah banyak siswa atau mahasiswa menyumbungkan pemikiran sesuai dengan keahliannya. Keterampilan yang dimiliki mampu dikembangkan menjadi suatu karya inovatif yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan, secara kuantitas saat ini telah banyak berdiri SMK atau Perguruan Tinggi (PT) yang mengembangkan pendidikan vokasi. Banyak SMK didirikan dengan tujuan agar menghasilkan lulusan yang terampil, sehingga siap bekerja sesuai dengan keahliannya.

Perkembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan (vokasi) didukung adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang ketenagakerjaan yang memuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selanjutnya, pada tahun 2015 pemerintah melalui penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 telah melakukan memperkuat jalinan kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penguatan secara strategis penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional melalui pendidikan kejuruan/vokasi. Pendidikan kejuruan meliputi dua jalur pendidikan formal yaitu pendidikan yang bersifat akademik dan vokasi (terapan).

Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan vokasi direspon baik oleh SMK dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan banyak didirikan jurusan yang mengarah pada pendidikan vokasi. UNY sebagai salah satu LPTK ternama di Indonesia wajib ikut berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi selama 54 tahun pengabdian. Salah satu bentuk kongkritnya adalah melalui pelaksanaan penelitian, workshop, dan seminar yang bertemakan pendidikan vokasi, yang bertujuan memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang makna dari pendidikan dan pelatihan kejuruan itu sendiri. Dalam kesempatan peringatan Dies ke-54 FT UNY ini ikut berkontribusi dalam upaya tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan seminar nasional pendidikan vokasi yang bertemakan **"Pendidikan Vokasi : Peluang dan Tantangan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) 2015"** .

Seminar yang diselenggarakan oleh FT UNY diharapkan mampu menghasilkan berbagai ide solutif untuk mengembangkan pendidikan vokasi dalam menyongsong MEA 2015. Kontribusi positif tertuang pada kumpulan hasil penelitian atau ide gagasan tentang pendidikan vokasi oleh peserta seminar. *Proceedings* ini akan menambah wawasan bagi pembaca dan memunculkan berbagai gagasan terhadap pendidikan vokasi. Semoga *proceedings* ini bermanfaat bagi semua masyarakat, khususnya yang aktif dalam pendidikan vokasi. Selamat membaca!

Yogyakarta, 5 Februari 2015
Tim SNPV 2015 FT UNY

Sambutan Ketua Panitia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbilalamiin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga serangkaian Acara Dies ke-54 FT UNY tertuang dalam Seminar Nasional Pendidikan Vokasi (SNPV 2015) dapat terselenggara dengan baik sesuai jadwal yang direncanakan. SNPV 2015 merupakan sebuah forum ilmiah, silaturahmi, komunikasi, sosialisasi, publikasi hasil penelitian dan diskusi perkembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan vokasi menghadapi MEA 2015. Acara ini dapat terselenggara dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Teknik UNY
3. Peserta dan Pengirim makalah dalam *proceeding* SNPV 2015
4. Panitia Dies Natalis ke-54 FT UNY
5. Forum komunikasi APTEKINDO
6. Panitia SNPV 2015 dan
7. Semua pihak yang membantu terlaksananya seminar ini

SNPV 2015 diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, guru, kepala sekolah, dosen dan pemerhati pendidikan vokasi. Selain itu juga dihadiri oleh pemakalah pendamping yang akan mempresesntasikan hasil penelitian dan pemikiran. Makalah ini akan dipublikasikan pada *proceeding* SNPV 2015. Pengirim makalah berasal berbagai kalangan, yaitu guru, dosen, pengajar diklat dan para peneliti dan pemerhati dunia pendidikan vokasi. Harapan kami, semoga makalah yang tersaji dapat memenuhi tujuan dari seminar ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Februari 2015

Dr. Ratna Wardani, M.T.

Sambutan Dekan Fakultas Teknik UNY

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera

Alhamdulillah Robbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga dipertemukan dalam kegiatan ilmiah Seminar Nasional Pendidikan Vokasi 2015 di KPLT FT UNY.

Kami sekeluarga besar Fakultas Teknik UNY mengucapkan "Selamat Dies Natalis ke-54 FT" "Selamat Datang", "Sugeng Rawuh", "Welcome" di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, dan Selamat Datang juga di Kota Pelajar Yogyakarta "Istimewa" Kota Budaya dan Pariwisata.

Perkembangan Pendidikan Vokasi dewasa ini telah banyak mempengaruhi kebijakan, khususnya penyiapan tenaga kerja dibidang industri dan jasa. Adanya kesadaran bahwa Pendidikan Vokasi sebagai disiplin keilmuan yang memiliki kekhususan sendiri sesuai kebutuhan pendidikan dan pelatihan vokasi, memberi dampak pada penyiapan perangkat pembelajaran, desain, model dan metode pembelajaran serta implementasi kurikulum, termasuk didalamnya penyiapan output dan outcome pendidikan vokasional yang mampu mensiasati implementasi MEA 2015 dan mengedepankan profesionalitas dan daya saing internasional.

Melalui kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Vokasi 2015, kami berharap dapat membuka wawasan tentang perkembangan yang terjadi dalam bidang Pendidikan Vokasi yang fokus pada penyiapan *output* dan *outcome* seiring diberlakukannya MEA 2015, sehingga perkembangan Pendidikan Vokasi mampu menjadi pionir penyiapan kebutuhan tenaga kerja profesional, baik untuk kebutuhan industri maupun masyarakat umum. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih atas partisipasinya pada seminar ini dan penghargaan kepada para narasumber serta seluruh panitia penyelenggara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Februari 2015
Dekan FT UNY

Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd.

Daftar Isi

COVER	
HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	IV
SAMBUTAN KETUA PANITIA	V
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNY	VI
DAFTAR ISI	VII
1. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DAN PENDIDIKAN VOKASIONAL ABAD 21 Putu Sudira	1
2. EMPLOYABILITY SKILL PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (Bahan Kajian Untuk Pengembangan Pendidikan Vokasi) Sumarno.....	10
3. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KINERJA GURU PROFESIONAL DI SMK DALAM MENYONGSONG MEA Mujahid Wahyu.....	21
4. GURU BAHASA INGGRIS VOKASI DI ERA GLOBAL: PERLUNYA PERUBAHAN ORIENTASI PEMBELAJARAN Kun Aniroh Muhrofi-Gunadi	28
5. IDENTIFIKASI KOMPETENSI SMK JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR Bambang Sulistyo, Tawardjono Usman, Ibnu Siswanto	37
6. IMPLEMENTASI FLATE RATE DAN PENCAPAIAN PRESTASI BELAJAR PADA MATA KULIAH PRAKTIK TEKNOLOGI PEMBENTUKAN DASAR (TPD) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF FT UNY Amir Fatah.....	45
7. IMPLEMENTASI LESSON STUDY GUNA PENINGKATAN KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN PRAKTIK KEJURUAN Sudarwanto	52
8. IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN COMPETENCE BASED TRAINING (CBT) BERBASIS KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PROSES PEMESINAN DI JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FT UNY Paryanto	61
9. IMPLEMENTASI MODEL PROJECT BASED LEARNING PADA MATA KULIAH TUNE-UP MOTOR BENSIN JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF UNM Muhammad Yahya ¹ dan Darmawang ²	69
10. IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM PADA PEMBELAJARAN CNC DASAR Bambang Setiyo Hari Purwoko	76

EMPLOYABILITY SKILL PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (Bahan Kajian Untuk Pengembangan Pendidikan Vokasi)

Sumarno

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan 20221 Telp (061) 6625971
masno63@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan vokasi dikonstruksi atas komponen konteks, input, proses, produk, dan outcome. Keberadaan komponen ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan vokasi jangan dipandang semata-mata sebagai suatu gejala persediaan (supply phenomena) dimana persoalan-persoalannya hanya terpusat pada bagaimana menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya dan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi pendidikan harus dipandang sebagai fenomena permintaan (demand phenomena) dimana persoalan utama pendidikan adalah untuk apa lulusan dihasilkan atau untuk apa mutu ditingkatkan. Mensikapi kondisi filosofis ini dan datangnya era ekonomi baru Asean Economic Community 2015, yang salah satu karakteristik kuncinya adalah single market and production base, dengan salah satu elemen intinya adalah free flow of skilled labour, maka lulusan pendidikan vokasi dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai sepadan dengan perubahan tuntutan pasar kerja. Keterampilan yang dibutuhkan pada era ekonomi baru ini, dimana terjadi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan, yang ditandai oleh perubahan kebutuhan keterampilan yang cepat adalah employability skills.

Kata kunci: employability skills, pendidikan vokasi

Pendahuluan

Konsep investasi sumber daya manusia (SDM) berpangkal pada teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: tanah, modal, SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor SDM merupakan faktor yang paling menentukan, karena faktor lainnya itu tergantung pada faktor manusia (Gaffar, 1982).

Dalam proses pengembangan SDM menurut Gaffar (1982) ada tiga fase yang harus dilalui, yaitu fase persiapan, pendayagunaan, dan peningkatan. Fase persiapan adalah fase pendidikan. Fase pendayagunaan adalah fase transisi dari sekolah ke dunia kerja. Fase peningkatan adalah fase pengembangan SDM di dunia usaha atau industri.

Pada fase persiapan, proses pengembangan SDM umumnya dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Pada fase ini akan terjadi proses pengembangan pengetahuan, sikap nilai, keterampilan dan sensibilitas (Kidd, 1978), daya imajinatif dan spiritual (Mabud, 1999). Tujuan yang diharapkan dari fase ini adalah membantu lulusan lembaga pendidikan untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik,

sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan itu (Gaffar, 1982).

Pada fase pendayagunaan (transisi dari sekolah ke dunia kerja), menunjukkan adanya kesenjangan kuantitatif dan kesenjangan kualitatif antara lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan vokasi dengan permintaan pasar kerja. Kesenjangan kuantitatif terjadi disebabkan oleh permintaan tenaga kerja di pasar kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah lulusan pendidikan vokasi. Sedangkan kesenjangan kualitatif adanya ketidaksuaian antara kualifikasi atau jenis skill dihasil oleh lembaga pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.

Indikasi di atas ditunjukkan oleh data Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan tahun 2014, dimana pada Februari 2014 jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,2 juta orang, terdiri atas 7,21% berlatar belakang pendidikan sekolah menengah kejuruan dan 5,87% berlatar belakang pendidikan diploma, sisanya 86,92% berlatar belakang SD ke bawah, SMP, SMA dan Universitas.

Bila angka pengangguran tersebut diakibatkan oleh kesenjangan yang bersifat

kualitatif, maka walaupun kesempatan kerja yang tersedia banyak dan pencari kerja kurang, tetap akan terjadi pengangguran. Permasalahan kualitatif ini berkaitan dengan kesejangan kompetensi atau bidang keahlian yang dimiliki lulusan pendidikan vokasi penyuplai tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Hal ini terjadi karena lapangan kerja mengalami perubahan skill begitu cepat, sedangkan vokasi akan selalu ketinggalan dalam merespon perubahan.

Dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of Asean Community by 2015* pada tanggal 12 Agustus 2007, terutama berkenaan dengan *Asean Economic Community by 2015* (AEC 2015) dan menjelmannya kerjasama Asean menjadi satu kawasan dengan *free movement of good, service, investment, skilled labour, and free flow of capital*, maka akan berimbas pada pendidikan vokasi dalam mendesain program dan melaksanakan pendidikan yang sepadan dengan perkembangan layanan (*service*), percepatan perkembangan teknologi, dan pasar tenaga kerja.

Menurut Semeijn, Velden, & Boone (2000) karena perkembangan teknologi yang begitu cepat dan orientasi berbagai organisasi nasional maupun internasional meluas, mengakibatkan tututan terhadap tenaga kerja telah berubah, sehingga *traditional "hard" selection devices like educational background still count, but are not sufficient anymore*.

Pada transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan, pendekatan ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*), keterampilan dan pengetahuan telah menjadi faktor utama dalam produksi, dan pengukuran kompetensi secara langsung merupakan langkah logis dalam menentukan dan memprediksi kesuksesan tenaga kerja di tempat kerja yang akurat dan handal (Van Loo & Semeijn, 2001). Menurut Grip & Heijke (1998) untuk menghadapi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan skill dengan cepat diperlukan *employability skills*.

Employability skills menjadi makin penting sejak krisis ekonomi, dimana sejak krisis ekonomi tersebut mengakibatkan seseorang lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan tetap bekerja (Sanders & Grip, 2003). *Employability* merupakan karakteristik individu yang berhubungan dengan kemampuan bekerja

dan keinginan untuk tetap atraktif dalam pasar tenaga kerja (Sanders & Grip, 2003).

Pembahasan

Sejarah Singkat Pendidikan Berorientasi Dunia Kerja

Pada Pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, disebutkan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pada Penjelasan Pasal 15 disebutkan bahwa:

- Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Penjelasan Pasal 15 di atas menunjukkan bahwa ada dua istilah yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja, (1) pada pendidikan menengah disebut dengan pendidikan kejuruan, dan (2) pada pendidikan tinggi disebut digunakan istilah pendidikan Vokasi. Namun demikian pada tulisan ini pendidikan vokasi yang dimaksud adalah pendidikan menengah kejuruan.

Dewey menggambarkan pendidikan kejuruan sebagai proses sepanjang hidup yang membantu individu menemukan arah dan makna di dalam kehidupannya (Shumer, 2001). Berdasarkan pendapat Dewey dapat ditarik benang merah penjelas bahwa pendidikan kejuruan telah ada dan sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia.

Pendidikan kejuruan bermula ketika orang tua mengajari anak-anaknya keterampilan-keterampilan (*skills*) yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidup, seperti berburu pada masyarakat primitif. Pada masa itu anak-anak belajar keterampilan dari orang tuanya melalui melihat dan mencontoh proses yang dilakukan orang tuanya sehingga anaknya akan melakukan keterampilan yang sama dengan yang dilakukan orang tuanya (Gallinelli, 1979).

Sekolah berorientasi kerja keteknikan yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah akademi pelayaran (*Academie der Marine*). Sekolah ini didirikan pada tahun 1743 yaitu zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Sekolah ini berbasis

kepentingan penjajah. Pada tahun 1755 akademi ini ditutup (Supriadi, 2002).

Setelah kekuasaan VOC berakhir di penghujung abad ke-18, pendirian sekolah-sekolah kejuruan dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang didasarkan atas keturunan, bangsa, dan status sosial. Setelah berkuasa lebih dari dua abad sejak zaman VOC (yaitu pada tahun 1853), pemerintah Hindia Belanda baru mendirikan sekolah kejuruan, yaitu Sekolah Pertukangan Surabaya (*Ambachts School van Soerabaia*) yang diperuntukan bagi anak-anak Indo dan Belanda (Supriadi, 2002), khususnya dari golongan miskin yang tinggal di Hindia Belanda ketika itu (Sabirin Ismail, 2002). Pada tahun 1856 di Jakarta juga didirikan sekolah sama, dengan nama *Ambarchts Leergang* (Supriadi, 2002; Sabirin Ismail, 2002). Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda mengusahakan Sekolah Pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa, sedangkan untuk golongan pribumi hingga saat itu belum ada (Supriadi, 2002).

Bila dilihat berdasarkan peristiwa sejarah pendidikan kejuruan di atas, maka Sekolah Pertukangan Surabaya yang didirikan pada tahun 1853 (di luar Akademi Pelayaran yang didirikan pada tahun 1743) dapat dinyatakan sebagai sekolah kejuruan teknik pertama di Indonesia. Bila sekolah ini dijadikan sebagai patotakan berdirinya sekolah kejuruan, maka hingga sekarang sekolah kejuruan di Indonesia sudah berusia 154 tahun (lebih dari satu setengah abad).

Mulai pada tahun 1900 Pemerintah Hindia Belanda telah menunjukkan kehendaknya untuk mengubah arah pendidikan di Hindia Belanda yang *eletis* dan *segragatif* ke arah pendidikan yang lebih *populis* dan *egaliter*. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya semacam sekolah SMK yang disebut dengan *Koningen Wilhelmina School* (KWS) pada tahun 1901 di Batavia (Siregar, 2002) dan dibukanya peluang bagi orang-orang Bumiputra (meskipun masih terbatas pada kalangan kaum priyai), yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan orang-orang Cina. Begitu juga dengan tanggung jawab pengelolaan lembaga pendidikan, dimana sebelumnya hanya mengandalkan prakarsa swasta Belanda dan Cina, pada periode ini mulai diambil alih oleh pemerintah (Supriadi, 2002).

Sekolah kejuruan yang dicanangkan pada periode ini adalah Sekolah Pertanian di Bogor, Sekolah Bagian A yang menekankan pada mata

pelajaran dagang, dan Bagian B yang menekankan pada mata pelajaran pendidikan masinis, ahli bangunan, dan ahli pertambangan, serta sekolah-sekolah kejuruan khusus, seperti kursus untuk ahli teknik gula, sekolah pertanian, pendidikan untuk guru-guru bantu.

Sejak dicanangkannya politik etika (*Etische Politiek*) yang dicanangkan oleh Ratu Belanda tahun 1901 tersebut (Supriadi, 2002), Pemerintah Hindia Belanda menunjukkan kesungguhan untuk menyediakan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang Bumiputera. Hal ini ditunjukkan dengan adanya anggaran Belanja Hindia Belanda tahun 1907 yang diperuntukkan bagi berdirinya tiga sekolah pertukangan, yaitu satu di Surabaya, satu di Betawi, dan satu di Semarang.

Selama pendidikan di sekolah pertukangan tersebut, murid-murid diberi pelajaran pertukangan kayu dan pertukangan besi. Sekolah ini tidak diperuntukkan semua golongan Bumiputera, tetapi untuk segolongan penduduk saja. Selain itu para lulusan diharapkan hanya mempunyai kecakapan dasar saja, sehingga untuk pembentukan praktis memerlukan beberapa bekerja di pabrik-pabrik industri dan di pekerjaan bangunan.

Akibat dari Politik Etika, jumlah lembaga, siswa dan guru sekolah kejuruan mengalami kemajuan. Pada tahun 1900 jumlah siswa sekolah kejuruan baru mencapai 3.520 orang, pada tahun 1940 jumlah siswa sekolah kejuruan meningkat menjadi 13.230 orang (Supriadi, 2002).

Suwarna (2002) menunjukkan enam jenis sekolah kejuruan yang berdiri pada zaman Belanda, yaitu: *Ambachts School van Soerabaia*, *Burger Avond School*, *Europeese Ambachts School*, *Koningen Wilhelmina School* (KWS), *Koningen Emma School* (KES), dan sekolah teknik tinggi (*Middelbare Technise School*). *Ambachts School van Soerabaia* adalah sekolah teknik tingkat pertama atau setara dengan sekolah teknik (ST). Sekolah ini didirikan pada tahun 1853 di Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Indo dan Belanda yang bekerja di siang hari, sehingga penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan pada malam hari.

Burger Avond School adalah sekolah pertukangan yang digabungkan dengan sekolah umum (*Hoogere Burger School* = HBS), dengan lama pendidikan dua tahu. Sekolah ini berdiri tahun 1876. Pada tahun 1885, *Burger Avond School* dipisahkan dari HBS, dan lama pendidikannya berubah menjadi empat tahun,

dan mata pelajarannya juga diperluas menjadi sekolah teknik.

Europeese Ambachts School, merupakan sekolah teknik yang diperuntukkan bagi bangsa Eropa. Sekolah ini didirikan pada tahun 1900. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda.

Koningen Wilhemina School (KWS), didirikan pada tahun 1901. Lama pendidikan di sekolah ini tiga tahun. Pada tahun 1911, didirikan juga KWS-B dengan jurusan mesin, bangunan sipil, dan pertambangan. Pada tahun 1913 lama pendidikan ditingkatkan dari tiga tahun menjadi 4 tahun. Pada tahun 1921 jurusan bangunan sipil dipisahkan menjadi dua jurusan, yaitu: bangunan sipil dan bangunan air. Pada tahun 1926 jurusan mesin juga dipisahkan menjadi dua jurusan, yaitu: jurusan mesin khusus dan jurusan listrik.

Koningen Emma School (KES), merupakan penjelmaan dari *Burger Avond School* di Surabaya. Sekolah ini didirikan tahun 1912. Sekolah ini dilaksanakan pada siang hari dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dengan lama pendidikan tiga tahun. Pada tahun 1932 lama pendidikan KWS Jakarta dan KES Surabaya ditingkatkan dari tiga tahun menjadi lima tahun.

Sejak balatentara Jepang datang, sekolah-sekolah yang sempat ditutup karena situasi perang segera dibuka kembali, meskipun dengan jumlah yang jauh menurun jika dibandingkan dengan pada Zaman Belanda. Sekolah rakyat yang dibuka kembali hanya sekitar 13.500 sekolah atau sekitar 62,8% dari 21.500 sekolah yang ada. Sekolah menengah yang dibuka hanya 20 sekolah atau 2,4% dari 850 sekolah yang ada pada zaman Belanda. Pada masa ini pendidikan

menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita balatentara Jepang (Siregar, 2002).

Pendidikan kejuruan teknik tingkat pertama di Indonesia menjelang akhir masa penjajahan Belanda hingga masa pendudukan Jepang (1942-1945) terdiri atas: (1) *Ambachts Leergang*, yang mempersiapkan tenaga kerja tingkat tukang; (2) *Ambachts School* yang memberi latihan lebih tinggi; dan (3) *Technische Schoo*, setara dengan ST (Sabirin Ismail, 2002).

Menurut Siregar (2002) sekolah kejuruan setingkat ST yang sempat dibuka kembali adalah Sekolah Pertukangan (*Ambachts School* dan *Ambachts leergang*) dan Sekolah Teknik Menengah. Suwarna (2002) menunjukkan dengan lebih terperinci sekolah-sekolah kejuruan yang dibuka kembali pada zaman Jepang. Sekolah-sekolah tersebut, yaitu: *Middlebare Technise School* yang pada zaman Belanda disebut Sekolah Menengah Teknik Tinggi dan merupakan embrio STM, Sekolah Pertukangan (*Kogyo Gakko*), Sekolah Teknik Menengah (*Kogyo Semmon Gakko*), Sekolah Pelayaran, dan Sekolah Pelayaran Tinggi.

Pada masa kemerdekaan, *Ambachts Leergang* dikenal dengan Sekolah Pertukangan (SPT), *Ambachts School* menjadi Sekolah Pertukangan Lanjutan (SPL), dan *technische School* menjadi Sekolah Teknik (ST). Lama pendidikan SPT adalah dua tahun setelah SD enam tahun, SPL satu tahun setelah SPT; dan ST empat tahun setelah SD kemudian berubah menjadi tiga tahun (Sabirin Ismail, 2002).

Pada zaman kemerdekaan, jumlah sekolah yang berorientasi kejuruan teknik dan industri (STM dan ST) negeri dan swasta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Sekolah STM dan Sekolah Teknik (ST) Sebelum Pelita I hingga Akhri Pelita V (Achmad Suwarna, 2002)

Lembaga	Periode					
	Sebelum Pelita I (1969)	Akhir Pelita I (1973/19974)	Akhir Pelita II (1978/1979)	Akhir Pelita III (1983/1984)	Akhir Pelita IV (1988/1989)	Akhir Pelita V (1993/1994)
STM	126	481	664	690	891	896
ST/SMKTP*	565	765	292	248	252	73*
Jumlah	691	1246	956	938	1143	969

Sekolah kejuruan tingkat pertama dihapus sejak berlakunya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa

pendidikan kejuruan dilaksanakan pada tingkat menengah atau SLTA yang disebut dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pada tahun 1996/1997, sekolah-sekolah menengah kejuruan yang semula menunjukkan sifat spesifik masing-masing, misalnya Sekolah Teknologi Menengah (STM), Sekolah Ekonomi Menengah Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), dan yang sejenisnya diubah menjadi satu nama generik yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini dimaksudkan agar dinamika perubahan yaitu penambahan, pengurangan, dan penyesuaian bidang dan program keahlian di sekolah kejuruan dapat berlangsung secara elastis (Sudrajat, 2002). Misalnya, sekolah yang

tadinya mengkhususkan diri pada bidang dan program keahlian teknologi dapat saja membuka bidang dan keahlian lain seperti pariwisata.

Core bidang keahlian SMK hingga tahun akademik 2014/2015 telah memiliki delapan bidang keahlian, yaitu: Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Seni Kerajinan dan Pariwisata, Agribisnis dan Agro industri, dan Bisnis Manajemen. Dengan 40 program studi keahlian, dan 140 kompetensi keahlian.

Setelah berubah menjadi SMK, perkembangan kuantitatif SMK tahun 2008/2009 hingga 2011/2012 rata-rata 853 sekolah pertahun (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Sekolah SMK Tahun 2008/2009 hingga 2011/2012 (BPS, 2015)

Tahun			
2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
7.592	8.399	9.164	10.256

Walaupun perkembangan kuantitatif SMK bertambah, tetapi sejarah menunjukkan bahwa target yang direncanakan pemerintah belum tercapai. Dimana pada Rencana Pembangunan Semesta Berencana yang pernah dikenal pada zaman pemerintahan Orde Lama merencanakan pertumbuhan sekolah kejuruan secara besar-besaran sehingga mencapai perbandingan 75% : 25% antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum (Wardiman, 1998). Hal yang sama juga terjadi pada Rencana Strategis 2009, dimana Depdiknas merencanakan perbandingan mencapai 70% SMK: 30% SMA, hingga akhir 2014 juga belum tercapai. Hal ditunjukkan oleh data tahun 2015 dimana jumlah sekolah SMA dan MA ada 18.328 sekolah sedangkan SMK 11.738, dengan kata lain jumlah SMA hampir dua kali jumlah SMK (DITPSMK, 2015). Tidak tercapainya rencana pemerintah ini disebabkan oleh: (1) momentum pertumbuhan kuantitatif pendidikan kejuruan mulai dirasakan tersendat sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001, yang ditandai dengan makin sulitnya mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah baru, rehabilitas sekolah/peralatan yang ada, dan pengadaan peralatan baru (Supriadi, 2002), dan (2) pembangunan SMK belum mencermati perkembangan *attainment effect* siswa yang sangat terkait dengan psikologi orang tua terhadap masa depan anaknya, perkembangan permintaan pasar, serta *indicator of future labour market* (indikator masa depan lulusan di pasar kerja).

Pengertian Employability

Sisi *demand* SMK adalah dunia usaha/industri (DUDI). Pada sisi ini, SMK dipandang oleh DUDI sebagai penyedia tenaga kerja tingkat menengah. Lulusan dari SMK diharapkan *match* dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh DUDI, baik yang bersifat kuantitatif (jumlah tenaga kerja) maupun yang bersifat kualitatif.

Dalam term kualitatif, permintaan DUDI berupa atribut yang melekat pada diri seorang tenaga kerja, sehingga dengan atribut tersebut orang yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Atribut tersebut adanya yang menyebutnya dengan istilah *skill*, keterampilan, kualifikasi atau kompetensi.

Penggunaan istilah *skills*, keterampilan, kualifikasi atau kompetensi tersebut sangat tergantung pada latar belakang orang tersebut, yang mencakup studi, refleksinya dan pengalaman pribadinya terhadap istilah tersebut. Pada tulisan ini digunakan istilah keterampilan atau *skill* yang dapat saling dipertukarkan.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan keterampilan yang cepat adalah *employability skills*. Menurut Sanders & Grip (2003) *employability* menjadi konsep kunci dalam ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*). Kinerja pasar kerja seseorang tidak lagi hanya tergantung pada pendidikan awal saja.

Sampai hari ini pasar tenaga kerja membutuhkan pengembangan karir dan pengembangan belajar sepanjang karir.

Paradigma *lifetime employment* nampaknya telah diganti dengan paradigma baru *lifetime employability* yang ditandai oleh tingkat fleksibilitas yang tinggi didasari oleh kompetensi. *Employability* menjadi lebih penting sejak krisis ekonomi, dimana seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan tetap bekerja.

Menurut Sanders dan Grip (2003) konsep *employability* pekerja bukan merupakan konsep baru. Konsep *employability* pekerja telah dikembangkan pada tahun 1950 an dan hingga kini konsep ini telah banyak mengalami perubahan pada fokus konsepnya. Secara lebih terperinci Sanders dan de Grip merangkumkan perkembangan konsep *employability* sebagai berikut.

Pada tahun 1950 an dan tahun 1960an *employability* dilihat sebagai potensi individu untuk dapat bekerja. Pada saat itu perhatian pada umumnya difokuskan pada sikap pekerja dan persepsi diri pekerja terhadap pekerjaan yang terjadi selama karirnya. Mulai dari tahun 1970 dan berikutnya, perhatian difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan akupasional sebagai pengganti dari sikap pekerja. Tidak hanya keterampilan akupasional dasar, tetapi juga pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan seseorang, pengetahuan posisi seseorang di pasar tenaga kerja, dan pada periode ini pengetahuan tentang situasi pekerjaan yang memegang peran yang sangat penting.

Setelah tahun 1980 konsep *employability* makin lama makin menjadi lebih *meta-characteristic* terhadap nilai pasar tenaga kerja dari seorang pekerja. *Meta-characteristic* ini mengkombinasikan sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan sangat menentukan potensi pasar tenaga kerja dari pekerja. Dalam sense ini *employability* mempunyai pengaruh penting terhadap karir seorang pekerja, apakah itu pada tahap awal karir, pada saat pengembangan dan pada saat akhir karir.

Pada tahun 1990an muncul pandangan yang berbeda-beda terhadap *employability* dan bagaimana *employability* mempengaruhi seseorang. Misalnya peran skill dan potensi pasar tenaga kerja seseorang, kemungkinan-kemungkinan menggunakan *employability* pekerja dalam organisasi, kapasitas pekerja dalam mempengaruhi karir yang bersangkutan dan perubahan-perubahan.

Employability skills adalah kelompok skills inti yang transferable yang menggambarkan fungsional sifat-sifat dasar pengetahuan, skills, dan sikap yang dibutuhkan oleh tempat kerja (dunia usaha) pada abad 21. *Employability skills* tersebut diperlukan untuk kesuksesan pada semua level tenaga kerja dan semua level pendidikan (Overtoom, 2000). *Employability* adalah kemampuan seseorang untuk memasuki pasar tenaga kerja dan bergerak di dalam pasar tenaga kerja dan untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin dapat diperoleh dan yang dapat berlangsung lama (Northern Ireland Departement for Employment and Learning, 2003).

Employability mempunyai berbagai sifat: (1) *job-match employability* yang merujuk pada kemungkinan pekerja untuk tetap bekerja pada pekerjaannya sekarang pada perusahaan yang sama (pekerjaan yang sama dan majikan yang sama). (2) *firm internal employability* yang merujuk pada kemungkinan pekerja untuk pindah ke pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. (3) *external employability* merujuk pada kemungkinan pekerja untuk pindah ke pekerjaan lain pada perusahaan yang berbeda (Sanders & Grip, 2003).

Thijssen (Sanders & Grip, 2003) mengembangkan taksonomi terhadap definisi *employability* yang ada. Beliau membedakan tiga tipe definisi *employability*, yaitu: definisi inti (*a core definition*), definisi yang lebih luas (*a broader definition*), dan definisi gabungan (*an all-embracing definition*).

Definisi inti menunjukkan bahwa *employability* meliputi semua kemungkinan-kemungkinan seseorang untuk menjadi sukses dalam berbagai pekerjaan pada situasi pasar tenaga kerja yang ada. Pada definisi inti, *employability* hanya memperlakukan atau memandang kemampuan seseorang.

Employability skills tidak saja menyangkut *hard competences* yang menekankan bagaimana mengikuti prosedur, tetapi juga menyangkut *soft competences* yang menekankan pada *reasoning* atau *logic skills*, *interpersonal* dan *comunication skills*, *leadership*, *management*, dan *entrepreneural skills* (Hale, 2002). Uraian yang mirip diutarakan oleh BCA/ACCI (Smith, 2003) menyatakan bahwa *employability skills* terdiri atas: *communication skills*, *team work skills*, *problem solving skills*, *initiative and enterprise skills*, *planning and organising skills*, *self*

management skills, learning skills, dan technology skills.

Menurut the Conference Board of Canada (2000) *employability skills* terdiri atas: (1) *fundamental skills*; yaitu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sebagai dasar untuk pengembangan lebih jauh. Keterampilan ini terdiri atas kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola informasi, dan menggunakan bilangan. (2) *Personal management skills*, yaitu *personal skills, attitudes dan behaviours* yang mendorong potensi seseorang untuk tumbuh. Keterampilan ini terdiri atas kemampuan mendemonstrasikan sikap dan tingkah laku positif, memiliki rasa tanggungjawab, dapat beradaptasi, berkeinginan untuk belajar terus, bekerja dengan cermat, berpikir dan memecahkan masalah. (3) *Teamwork skills*, yaitu keterampilan dan atribut yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Keterampilan ini terdiri atas kemampuan bekerjasama dengan orang lain, dan mampu berpartisipasi dalam tugas-tugas.

Dari berbagai pendapat dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *employability skills* merupakan adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja, dan dengan kompetensi yang dimilikinya tersebut seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan sukses.

Lulusan SMK diorientasi untuk bekerja sebagai tenaga kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Orientasi mengisyaratkan bahwa lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian agar lulusan SMK tetap atraktif dalam pasar tenaga kerja, maka lulusan SMK harus memiliki *employability skills*, yang terdiri atas: *fundamental skills, personal management skills, teamwork skills, dan technological skills.*

Skill Lulusan SMK

SMK di Indonesia dapat dibedakan menjadi delapan kelompok bidang keahlian SMK, yaitu: Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Seni Kerajinan dan Pariwisata, Agrobisnis dan Agroindustri, serta Bisnis Manajemen. Dari delapan bidang keahlian dispesialisasi lagi 40 program studi keahlian, dan dari 40 program keahlian tersebut dispesialisasi menjadi 140 kompetensi keahlian.

Skill yang dimiliki lulusan SMK dapat ditelusuri melalui: (1) penelitian penelusuran, yaitu dengan melihat masa tunggu, jenis

pekerjaan lulusan dan perkembangan karir lulusan SMK, (2) percematan terhadap struktur bidang keahlian dan struktur kurikulum, dan pengamatan terhadap proses pembelajaran di sekolah.

Hasil survei ke 5 bengkel resmi yang bergerak di bidang otomotif di Kota Medan menunjukkan bahwa (1) lulusan SMK yang bekerja di bengkel resmi ini, tidak langsung diminta untuk langsung bekerja dengan mengandalkan skill yang mereka miliki ketika lulusan SMK, tetapi mereka mendapat pendidikan dan latihan di lembaga yang dimiliki bengkel tersebut (1) Tidak ada lulusan SMK yang menjadi kepala bengkel. Kepala bengkel yang ada berlatar belakang pendidikan S1, bukan mereka yang awalnya dari lulusan SMK kemudian melanjutkan kuliah S1. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas karir lulusan SMK sangat rendah, *learning* lulusan SMK rendah.

Spesialisasi yang menyempit pada kompetensi keahlian tertentu menunjukkan bahwa SMK didesain untuk mensepadankan kemampuan lulusan dengan permintaan pasar (DUDI) dan hanya menjurus pada satu keahlian kejuruan saja (sangat spesialisasi). Misal, untuk memenuhi permintaan pasar kerja berkenaan tenaga ahli pengelasan, pada SMK ada kompetensi keahlian teknik pengelasan. Untuk memenuhi permintaan pasar berkenaan tenaga ahli instalasi tenaga listrik, pada SMK ada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Untuk memenuhi permintaan pasar berkenaan dengan teknisi sepeda motor di SMK ada kompetensi teknik sepeda motor.

Kondisi spesialisasi ini akan mengakibatkan:

1. lulusan SMK akan sangat tergantung pada permintaan spesifik dari pasar kerja. Bila permintaan di suatu daerah berkenaan dengan kompetensi keahlian tertentu tidak ada, dan di daerah lain banyak permintaan, maka tetap akan terjadi pengangguran bila lulusan dari daerah yang tidak ada permintaan tersebut tidak mau migrasi.
2. bila permintaan kompetensi keahlian yang spesifik tersebut tidak ada, maka angka pengangguran akan semakin membung.
3. bila di suatu daerah ada permintaan tenaga kerja teknisi mobil, sedangkan di daerah tersebut hanya ada lulusan SMK dengan kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor, maka lulusan SMK dengan kompetensi

keahlian Teknik Sepeda Motor enggan untuk mendatangi perusahaan tersebut.

Bila dicermati dari struktur mata pelajaran SMK, baik Kurikulum KTSP maupun Kurikulum 2013, dapat dikatakan tidak jauh berbeda muatannya. Perbedaannya hanya adanya muatan lokal pada kurikulum KTSP. Pada struktur kurikulum SMK terdapat mata pelajaran akademik seperti: Kimia, Biologi, Fisika. Struktur ini menggambarkan bahwa lulusan SMK dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, dan juga dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi.

Adanya mata pelajaran Kimia, Biologi dan Fisika, sebaiknya tidak ada di setiap bidang keahlian, tetapi dicermati mana diantara ketiga mata pelajaran tersebut yang nantinya punya andil dalam pengembangan teori atau praktik kejuruan. Begitu juga mata pelajaran lain yang mempunyai tujuan pengembangan kompetensi yang hampir sama sebaiknya dijadikan satu saja.

Berdasarkan kajian terhadap struktur bidang keahlian dan struktur kurikulum, dan pengamatan terhadap proses pembelajaran di sekolah; dan survei ke lima bengkel resmi bidang otomotif, dapat disimpulkan bahwa: lulusan SMK cenderung memiliki skill yang terpaku pada kompetensi keahliannya, misalnya lulusan Teknik Sepeda Motor memiliki kompetensi keahlian sepeda motor saja, mereka tidak dibekali dengan kemampuan dasar yang memadai yang memungkinkan mereka untuk bergerak ke bidang keahlian yang lebih luas.

Pada lulusan SMK kompetensi keahlian menggambarkan lapangan kerja yang seharusnya dimasuki oleh lulusan SMK. Misal, lulusan SMK dengan kompetensi Teknik Sepeda Motor, peluang kerja mereka adalah bengkel-bengkel sepeda motor atau buka usaha sepeda motor. Seharusnya kompetensi itu menggambarkan atribut yang melekat pada diri seorang tenaga kerja, bukan lapangan kerja yang mungkin mereka masuki.

Siswa SMK hanya perlu dibekali kemampuan-kemampuan dasar yang menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi (skill) ke depan. Sedangkan fase pengembangan menjadi tanggungjawab individu yang bersangkutan dan industri dimana mereka bekerja. Menurut Suyanto (1999) aktivitas pendidikan hendaknya jangan semata-mata berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tetapi lebih jauh dari itu harus memperkuat kemampuan dasar yang memungkinkan baginya untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai individu, anggota

masyarakat maupun sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global.

Pengkhususan keahlian pada SMK seperti ini mendapat sorotan dari para penganjur sekolah menengah kejuruan, seperti Lewis (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan mempunyai peran kritis dalam menyediakan akses terhadap pekerjaan yang diinginkan siswa. Dengan demikian jika pilihan pekerjaan dilakukan pada usia begitu awal, pilihan-pilihan masa depan akan menjadi tertutup. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pada level sekolah menengah selalu menekankan pada potensi sekolah untuk membantu mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang umum dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih relevan dan lebih berguna dari pada pelajaran yang khusus. Anak pada awal masuk sekolah SMK belum tahu pilihan pekerjaan yang akan ditekuninya. Menurut Dewey pendidikan kejuruan harus dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum komprehensif untuk membantu siswa mengembangkan *range* kapasitas personal agar pilihan pekerjaan masa depannya lebih luas (Margison, 2001).

Kritik Atas Label Nama SMK

SMK merupakan hasil peleburan dari sekolah kejuruan dengan ciri bidang keahlian yang berbeda, yaitu: teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, seni kerajinan dan pariwisata, agrobisnis dan agroindustri dan bisnis manajemen. Setiap SMK memiliki *core* bidang keahlian, masing-masing bidang keahlian terdiri atas program studi keahlian, dan kompetensi keahlian. Misalnya, SMK Teknologi dan Rekayasa, dengan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif akan dilabeli berdasarkan Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Alat Berat, Teknik Perbaikan Bodi Otomotif, Teknik Sepeda Motor, dan Teknik Ototronika.

Bila kita bertanya pada seorang lulusan SMK tentang keterampilan (skill) yang dimilikinya, dan dimulai dengan pertanyaan "anda lulusan darimana?" Bisa dipastikan kita akan kesulitan mengetahui keterampilan apa yang dimiliki oleh lulusan tersebut.

Kasus seperti di atas akan lebih sulit lagi bila ada SMK dengan bidang keahlian dengan *core* tertentu tetapi juga menyelenggarakan program keahlian di luar *core* bidang keahliannya. Misalnya ada SMK dengan *core* Seni, Kerajinan, dan Pariwisata yang seharusnya menyelenggarakan program keahlian:

Pariwisata, Tata Boga, Tata Kecantikan, dan Tata Busana, tetapi juga menyelenggarakan prodi keahlian Agribisnis Perikanan.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 1996/1997 dimana sekolah kejuruan menggunakan label yang lebih mudah diketahui oleh DUDI, dimana STM adalah sekolah kejuruan dalam bidang keteknikan, dengan jurusan Teknik Mesin, Teknik Bangunan, Teknik Otomotif, Teknik Elektro, dsb. SMEA dalam bidang ekonomi (bisnis dan manajemen).

Pada saat itu, bila kita bertanya pada seorang lulusan STM, bisa dipastikan kita akan mengetahui keterampilan yang dimiliki oleh lulusan tersebut adalah bidang keteknikan. Selanjutnya kita bisa bertanya jurusan apa? Teknik Otomotif. Maka dapat diketahui bahwa lapangan kerja yang mungkin dapat dimasuki adalah DUDI bidang otomotif. Sedangkan lulusan SMK dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program studi keahlian otomotif, dan kompetensinya teknik sepeda motor, akan mengalami kesulitan untuk memasuki pasar kerja bengkel otomotif (mobil).

Karakteristik AEC, dan Permintaan Employability Pasar Kerja

Deklarasi Cebu tanggal 12 Agustus 2007 menjadikan negara-negara Asean menyatu dalam satu kawasan masyarakat ekonomi (AEC) dan memandang (1) pasar dan produksi tunggal, (2) kawasan ekonomi kompetitif tinggi, (3) kawasan pengembangan ekonomi yang adil, dan (4) kawasan terintegrasi dalam ekonomi global sebagai karakteristik kunci. Masing-masing karakteristik kunci terdiri atas beberapa *core* elemen. Karakteristik kunci pasar dan produksi tunggal (*single market and production base*) terdiri atas lima *core* elemen, yaitu: *free flow of goods, free flow services, free flow of investment, free flow of capital, dan free flow of skilled labour* (Asean Secretariat, 2008).

Menurut Grip & Heijke (1998) untuk menghadapi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan skill dengan cepat diperlukan *employability skills*.

Konsekuensi dari diberlakukannya AEC 2015, negara-negara anggota Asean sepakat untuk saling memfasilitasi dan memberi kemudahan untuk terjadinya arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih secara bebas antar negara Asean. Arus kebebasan tersebut akan bermuara pada penyediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja dengan

kemampuan (skill) yang tidak statis (mudah berubah) sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Menurut Grip & Heijke (1998) perubahan kebutuhan skill dengan cepat menunjukkan telah terjadi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan.

Selanjutnya konsekuensi dari *free flow of skilled labour*, dan perubahan permintaan skill yang cepat karena telah terjadi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan akan sangat berpengaruh permintaan dan persaingan tenaga kerja terampil, termasuk didalamnya tenaga kerja terampil tingkat menengah (lulusan SMK). Di samping itu akan terjadi persaingan pasar tenaga kerja level menengah antar lulusan SMK dalam negeri dan juga dengan lulusan yang sejenis dari seluruh negara anggota Asean. Dengan kata lain persaingan tenaga terampil tingkat menengah akan semakin ketat.

Dampak dari kondisi ini lulusan SMK tidak lagi bisa diharapkan bila hanya memiliki kompetensi (skill) yang sangat spesifik dan tidak diikuti oleh kemampuan-kemampuan lain yang menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki *employability skills*. Karena tanpa *employability skills*, lulusan SMK akan mengalami hambatan saat memasuki pasar tenaga kerja dan ketika bekerja. Menurut Grip & Heijke (1998) untuk menghadapi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan skill dengan cepat diperlukan *employability skills*. Menurut Sanders & Grip (2003) *employability skills* menjadi makin penting sejak krisis ekonomi, dimana sejak krisis ekonomi tersebut mengakibatkan seseorang lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan tetap bekerja)

Simpulan

1. Sejarah SMK menunjukkan bahwa SMK mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan SDM.
2. Untuk dapat memasuki DUDI dan *attractive* di DUDI pada masa transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan skill dengan cepat dibutuhkan *employability skills*. Dengan datangnya AEC 2015, maka *employability skills* yang dibutuhkan DUDI makin tinggi standarnya.
3. Spesialisasi di SMK mempersulit lulusan untuk memasuki pasar kerja.
4. *Employability skills* sudah merupakan suatu keharusan untuk ditanamkan pada siswa

SMK untuk menghadapi perubahan skill yang begitu cepat.

Saran

1. Untuk menghadapi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan skill dengan cepat, maka siswa SMK perlu dibekali *employability skills*.
2. SMK sebaiknya tidak terjebak pada spesialisasi yang sangat sempit sehingga mempersempit lapangan kerja yang dapat dimasuki lulusan SMK. Sebaiknya spesialisasi siswa tidak didasarkan pada kompetensi keahlian, tetapi didasarkan pada program studi keahlian.

Labelisasi SMK sebaiknya menggunakan label yang mudah diketahui program studi atau jurusan yang ada di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Asean Secretariat (2008). *Asean Economic Community Blueprint*.
- Boediono (1997). *Pendidikan dan perubahan sosial ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Conference Board of Canada. (2000). *Employability skills 2000+*. Diambil pada tanggal 12 Januari 2004, dari <http://www.onferenceboard.ca/nbec>.
- Gaffar, M.F. (1982). *Perencanaan pendidikan: teori dan metodologi*. Jakarta: P2LPTK.
- Gallinelli, J. (1979). Vocational education, program at the secondary level: A review of development and purpose. Dalam Abramson, T; Tittle, C. K; dan Cohen L. London (Eds.), *Handbook of vocational education evaluation* (pp.19-36). London: Sage Publications
- Grip, A. de & Heijke, H. (1998). *Beyond manpower planning: ROA's labor market model and its forecasts to 2002*. Research Centre for Education and the Labor Market, Faculty of Economics and Business Administration: Maastricht
- Hale, J. (2002). *Performance-base evaluation, tools and techniques to measure the impact of training*. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer A Wiley Company.
- Kidds, J.R. (1978). *An urgency: Adult education in and for development*. The Declaration of Dar es Salam, dalam buku Hall, Budd L, and Kidds
- Lewis, M.L. (2000) Vocational education and the dilemma of education. *Journal of vocational education research*. Volume 25 (4).
- Mabud, S. A. (1999). Peace Education and Interreligious Dialogue. *Muslim Education Quarterly*. Autumn Issue. 17(1). Cambrige: The Islamic Academic.
- Margison, E.J.H. (2001). An assessment of the historical arguments in vocational education reform. *Journal of career and technical education*. Volume 17 (1).
- Overtoom. (2000) *Employability skills: An update*. Eric Digest: Center on Education and Training for Employment. The Ohio State University.
- Sanders & Grip, de (2003). *Training, task flexibility and low-skilled workers' employability*. Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Markaet, Faculty of Economics and Business Administration.
- Semeijm, J., Velden, Van der, & Boone, C. (2000). *Personality characteristics and labour market entry: an exploration*. Maastricht: Research Center for Education and the Labour Market.
- Shummer. R. (2001). A new, old vision of learning, working, and living: vocational education in the 21st century. *Journal of vocational education research*. Volume 26 (3).
- Siregar, K.S. (2002) Pendidikan di Indonesia dari zaman Jepang hingga sebelum Pellita. Dalam Sunaryo, et al. *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia, membangun manusia produktif*. (pp. 61-74). Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Smith, E. (2003). *How first time wokrs develop employability skills through working*. Business Council of Australi and the Autralian Chamber of Commerce and Industry (BCA/ACCI)
- Supriyadi, D. (2002). Satu setengah abad pendidikan kejuruan di Indonesia. Dalam Sunaryo, et al. *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di*

